



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 772/V/2013

IV/MEI 2013



DPR Minta Freeport Jamin Keluarga Korban Tambang Big Gossan



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT MEI 2013

Minggu keempat bulan Mei ini kegiatan Dewan ditandai dengan rapat-rapat paripurna DPR pada tanggal 20 dan 23 Mei 2013. Kegiatan tersebut dalam bentuk Keterangan Pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran DPR dan kegiatan lain yang rinciannya sebagai berikut.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Rapat Paripurna 20 Mei 2013, mengagendakan Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2014, disampaikan oleh Menteri BAPENNAS Armida Alisjahbana. Dalam keterangan Pemerintah disampaikan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) menguraikan tentang rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2014, untuk mencapai sasaran-sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014, dengan tetap memperhatikan perkembangan-perkembangan terkini baik yang terjadi didalam negeri maupun global. Dokumen KEM PPKF memuat strategi dan arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal ke depan yang diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014: **“Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”**. Substansi KEM dan PPKF Tahun 2014 ini mempunyai nuansa yang lebih khusus dibanding periode sebelumnya karena merupakan tahun terakhir rencana pembangunan dalam RPJM 2010-2014 sekaligus merefleksikan capaian kinerja pembangunan dalam lima tahun terakhir ini.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa relatif lemahnya kondisi ekonomi global di tahun 2012-2013 membawa implikasi negatif bagi perkembangan ekonomi domestik, yang telah mengalami tekanan yang bersumber pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Tekanan pada sisi ekspor Indonesia menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi domestik melambat dan berada di bawah target dalam RPJMN



2010-2014. Di tahun 2013, perkembangan kondisi ekonomi global belum benar-benar pulih, juga di perkirakan akan berdampak pada perekonomian domestik.

Di samping itu, berbagai perkembangan yang mengancam stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan ke depan, menuntut diambilnya langkah-langkah penyesuaian yang menjadi tekanan bagi pencapaian sasaran pembangunan dalam jangka pendek. Pemerintah menyiapkan beberapa strategi kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan, agar tetap tinggi di atas 6%. Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, maka tema kebijakan fiskal Pemerintah adalah: **“Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Yang Sehat dan Efektif”**.

Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2014, diperkirakan berada pada kisaran 6,4-6,9% atau di bawah target RPJM, namun lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 dan perkiraan Tahun 2013. Sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut adalah: Pertama, kinerja konsumsi rumah tangga yang selama ini merupakan kontributor pertumbuhan terbesar. Kedua, pertumbuhan investasi yang meningkat sebagai dampak kondisi fundamental yang tetap kuat serta perbaikan iklim investasi dan pasar yang terus berjalan. Ketiga, membaiknya kinerja neraca perdagangan Indonesia seiring peningkatan kinerja ekspor.

Disamping sasaran pertumbuhan, Pemerintah akan tetap menjaga target inflasi pada kisaran 4,5% ± 1%. Laju inflasi



merupakan salah satu faktor penting untuk tetap menjaga tingkat pendapatan riil masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi dan pasar.

Stabilitas perekonomian juga akan dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di tahun 2014 akan berada pada kisaran Rp. 9.600 hingga Rp. 9.800 per dolar AS. Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2014 diperkirakan berada pada kisaran 4,5% hingga 5,5%. Pergerakan suku bunga tersebut didasarkan pada masih baiknya daya tarik instrumen surat berharga negara, masih tingginya kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi dan kesehatan fiskal dan terjaganya laju inflasi. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun 2014 diperkirakan mencapai kisaran US\$ 100 hingga US\$ 115 per barel.

Esensi Strategi Belanja Negara Tahun 2014 yang disampaikan oleh Pemerintah untuk Tahun 2014 tetap diarahkan pada empat pilar, yaitu: (i) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (*pro-growth*); (ii) meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (*pro-job*); (iii) meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (*pro-poor*) dan (iv) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (*pro-environment*).

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dalam Rapat Paripurna 23 Mei, DPR telah memberikan persetujuan atas Draft RUU usul inisiatif Baleg DPR menjadi RUU DPR tentang Keuangan Negara. Latar belakang diusulkannya RUU ini adalah: Dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam hal keuangan, disebutkan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan UU. Hal-hal lain mengenai keuangan negara juga diatur dalam UU berikutnya, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan UU Pokok dalam Pengelolaan Keuangan Negara sebagai produk hukum nasional. Kelahiran UU No 17 tahun 2003 diiringi kelahiran UU berikutnya yaitu UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sebagai produk nasional yang menggantikan ketentuan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial belanda, kelahiran 3 UU ini yang biasa disebut dengan UU Paket keuangan sangat membanggakan dan memberikan aturan yang lebih jelas, bagaimana keuangan negara harus dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh negara, sehingga tujuan bernegara seperti yang diamanatkan konstitusi, bisa dicapai.

Namun demikian, substansi UU keuangan negara, bukannya tanpa ketidak sempurnaan. Pada tahap implementasi pun mengalami persoalan-persoalan dikemudian hari, dan mengalami kompleksitas, baik berkaitan dengan pengelolaan dana pihak ketiga, definisi keuangan negara, postur APBN maupun APBD yang lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai dan barang, tidak sinerginya perencanaan dan penganggaran, mekanisme check and balances dalam

pembahasan RAPBN/RAPBD yang belum optimal, dan sebagainya.

Melihat kompleksitas tersebut, maka Prolegnas jangka menengah 2010-2014 dan prolegnas prioritas 2013 menganggap penting untuk melakukan revisi UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang penyiapannya diserahkan pada Baleg.

Beberapa permasalahan yang mengemuka dalam pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang dianggap perlu dilakukan revisi antara lain: (1) tentang kesejahteraan rakyat. Postur APBN sebagai pengejawantahan UU Keuangan Negara tergerus pada biaya rutin Pemerintah dan kurang mencerminkan pada pembangunan kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. (2) tidak jelasnya pengaturan mengenai pengelolaan dana pihak ketiga/perwalian (*trustee fund*) oleh Negara, seperti dana haji atau sejenis yang dikelola oleh Negara. (3) Belum sinerginya antara perencanaan dan penganggaran. Dalam penyusunan APBN lebih mengutamakan kepentingan ego sektoral. (4) terdapat pengaturan yang tidak sinkron antara UU tentang Keuangan Negara yang menempatkan kekayaan negara, yang dipisahkan pada perusahaan Negara/Daerah/Badan Hukum sebagai salah satu objek Keuangan Negara dan dikelola sebagaimana keuangan publik, sementara di lain pihak, pengaturan mengenai BUMN diatur dalam UU tentang BUMN. Dan, UU tentang perseroan terbatas untuk dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip tata kelola korporasi dan untuk badan hukum seperti Perguruan Tinggi telah diatur dengan UU tentang Perguruan Tinggi.

Sistematika atas RUU ini terdiri dari 11 bab dan 62 pasal. Sedangkan Muatan Materi yang dirumuskan dalam RUU ini meliputi 13 ketentuan, antara lain: ruang lingkup atau cakupan keuangan negara; asas-asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara; perubahan siklus anggaran daerah yang dimulai 1 april-31 maret, sementara untuk siklus APBN tetap, dimulai 1 Januari-31 Desember; penerangan perencanaan dan penganggaran dengan mengatur wewenang Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan dalam proses perencanaan dan penganggaran dan hubungan kedua dalam proses tersebut; Penyusunan dan Penetapan APBN/APBD; Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Bank Central, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing; Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat dan sebagainya.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Laporan hasil kunjungan kerja DPR ke Timika- PT Freeport terkait dengan musibah kecelakaan kerja. Rombongan DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dengan beberapa anggota, disertai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Rozik B. Soetjipto dan Vice President Government Relation PTFI Simon Patrice Morin, melakukan kunjungan ke Tembaga Pura. Pada kesempatan ini, delegasi melihat lokasi musibah kecelakaan kerja di PTFI. Delegasi juga mendengarkan penjelasan dari PTFI

mengenai kronologis peristiwa runtuhnya bebatuan.

Beberapa hal diketahui oleh delegasi setelah melakukan diskusi. Diantaranya, terdapat 38 pekerja di dalam kelas yang menjadi lokasi runtuhnya bebatuan. Dilaporkan oleh direksi bahwa PTFI akan memberikan santunan kepada seluruh korban. Bagi korban meninggal, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan (60 kali *basic salary* dan berbagai tunjangan lainnya), PTFI juga akan memberikan santunan bagi anak korban untuk sekolah hingga ke Perguruan Tinggi dan kemudahan untuk dapat bekerja di PTFI.

Tim DPR meninjau lokasi dan dilakukan *induction* atau pengenalan medan dan peragaan pemasangan, penggunaan tabung oksigen dan perlengkapan lainnya. Setelah sempat melakukan negosiasi di area (mile 74) dengan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas untuk Korban Runtuhan, rombongan masuk ke area. Selanjutnya, tim melihat secara langsung bagaimana Tim Evakuasi bekerja dengan alat berat, sekaligus berdoa, dan memberikan semangat kepada Tim Evakuasi. Tim juga bertemu dengan Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., Richard C. Adkerson di terowongan yang juga sedang meninjau lokasi.

Selanjutnya, Tim DPR menuju ke RS Tembaga Pura menjenguk korban yang selamat. Secara umum kondisi kelima orang tersebut dalam keadaan baik. Rombongan turut memberikan semangat kepada para korban.

Dalam konferensi pers yang berlangsung, tim DPR menyampaikan: [1] DPR RI menganjurkan PTFI agar terus melakukan upaya penyelamatan semaksimal mungkin terhadap seluruh korban yang ada. Pencarian dan penyelamatan korban tidak boleh dihentikan. [2] DPR RI mengapresiasi seluruh upaya PTFI untuk menyelamatkan korban. [3] DPR RI menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh korban. [4] DPR RI menganjurkan agar Pemerintah yang dimotori oleh Kementerian ESDM untuk secepatnya melakukan inspeksi, investigasi, dan meminimalisasi kejadian serupa di masa mendatang. [5] DPR RI akan memastikan diberikannya santunan dan bantuan dari PTFI kepada keluarga korban.

Dalam perkembangan terakhir hingga Rabu 22 Mei 2013, diketahui bahwa seluruh korban (28 orang) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

DPR Minta Freeport Jamin Keluarga Korban Tambang Big Gossan

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta manajemen perusahaan PT. Freeport memberi perhatian kepada keluarga korban musibah runtuhnya area tambang bawah tanah Big Gossan, Papua. Harapan ini disampaikan saat menerima kedatangan Richard C. Adkerson Presiden and CEO, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang menjelaskan perkembangan terakhir upaya penyelamatan korban.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima kedatangan Richard C. Adkerson President and CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Saya ingin jaminan yang pernah diucapkan kepada saya di Papua, disampaikan lagi disini. Kepada seluruh keluarga korban nanti akan mendapat-

kan santunan asuransi, uang duka dan lain-lain yang layak. Termasuk Freeport memastikan putra-putri keluarga korban dibiayai sampai ke perguruan

tinggi. Kemudian memberi jaminan kepada putra-putra korban untuk masuk menjadi pekerja inti di Freeport,” ungkap Priyo dalam pertemuan di Ge-



dung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5/13).

Ia menambahkan kedatangan pimpinan Freeport ke DPR menunjukkan ekspresi itikad baik untuk menjelaskan musibah terbesar di dunia pertambangan Indonesia kepada wakil-wakil rakyat di Senayan. Sebagai Ketua Desk Papua dan Aceh ia mengaku telah mengunjungi secara langsung lokasi bencana, bahkan berkesempatan masuk ke terowongan mendekati lokasi bencana.

Politisi Partai Golkar ini juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim penyelamat yang berjumlah sekitar 200

orang yang didukung perlengkapan terbaik di dunia. Ia meminta segenap pihak menunggu hasil investigasi penyebab terjadinya bencana. "Saya belum ingin berspekulasi, tapi saya tegaskan disini kalau dari investigasi terdapat kelalaian saya meminta Freeport jangan lepas tanggung jawab," tandasnya.

Dalam penjelasannya Richard yang didampingi Rozik B. Soetjipto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia melaporkan upaya evakuasi telah berhasil menemukan 28 korban meninggal dunia dan 10 lainnya luka-luka. 5 orang saat ini masih dirawat di Papua dan 5 lainnya di RS Bintaro, Jakarta.

"Jaminan bagi seluruh korban kami berikan sesuai ketentuan UU ditambah kebijakan lain beasiswa pendidikan putra-putri korban sampai perguruan tinggi," kata Rozik. Ia juga menyetujui keluarga korban akan mendapat prioritas apabila berminat bekerja di Freeport.

"Investigasi penuh terhadap musibah ini akan kami lakukan dan hasilnya akan disampaikan kepada publik. Saat ini seluruh proses produksi di Freeport sementara waktu dihentikan untuk menghormati proses evakuasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap keselamatan kerja di perusahaan," tambah Richard. (iky)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Harus Berperan Tangani Krisis Suriah



Ketua BKSAP Surahman Hidayat.

Hal itu mengemuka saat Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) mengadakan Konsinyering membahas Evaluasi Kinerja BKSAP, di Hotel Le Meridien, Rabu, (22/5).

"Persoalan Suriah sudah lebih dua tahun sampai sekarang belum nampak titik terang, jutaan orang sudah mengungsi dan puluhan ribu meninggal. karena itu kita perlu mengkaji bagaimana BKSAP dapat berperan serta menangani krisis Suriah," ujar Muhammad Najib (F-PAN).

Sejumlah anggota BKSAP meminta DPR dan pemerintah segera mengambil sikap dan berperan menangani krisis Suriah yang telah memakan korban dan jutaan orang mengungsi ke berbagai negara.

Ketua BKSAP Surahman Hidayat mengatakan, dirinya akan segera meminta kejelasan posisi Indonesia dan perannya terkait konflik di Suriah guna mewujudkan perdamaian dunia di berbagai kawasan.

Sementara terkait Kemerdekaan Kosovo, Lanjut anggota DPR Hidayat Nurwahid (F- PKS) mempertanyakan sikap Pemerintah Indonesia terkait kemerdekaan Kosovo. "Sudah 98 negara mengakui Kosovo sebagai negara kenapa Indonesia tidak segera mengakuinya sehingga menjadi 99 negara," terangnya.

Menurutnya, Kosovo merupakan negara mayoritas Islam dan hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara sudah mengakui kemerdekaannya. "Kita mengharapkan Indonesia dapat berperan mengangkat isu Kosovo diberbagai forum kerjasama seperti Asia-Eropa, Bali Democratic Forum dan sebagainya," jelasnya. (si) Foto:Sugeng/Parle.

Semua Fraksi DPR Sepakat Lanjutkan Pembahasan RAPBN 2014

DPR setuju untuk melanjutkan pembahasan Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014. Hal ini berdasarkan pandangan fraksi-fraksi yang sudah disampaikan dalam Rapat Paripurna, Kamis

(23/5). Hal ini sekaligus menindaklanjuti atas keterangan pemerintah yang sudah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan pada Rapat Paripurna sebelumnya, Senin (20/5).

"Sesuai dengan tata tertib, fraksi

menyampaikan pandangan atas keterangan pemerintah tersebut pada rapat paripurna berikutnya," buka Wakil Ketua DPR Sohibul Iman ketika memimpin Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kamis (23/5).



Menteri Keuangan Chatib Basri, Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana sebelum Rapat Paripurna bahas RAPBN 2014.

Juru bicara yang ditunjuk, tambah Sohibul, diberi waktu tujuh menit untuk mewakili fraksinya menyampaikan pandangannya. Juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Chusnunia Chalim, kemudian dari fraksi Partai Gerindra mengirimi Fary Djemi Francis. Ferdinand Sampurna Jaya menjadi juru bicara fraksi Partai Hanura.

Kemudian dari fraksi Partai Demokrat diwakili oleh Heriyanto, dan Azwir Dainy Tara menjadi juru bicara fraksi Partai Golkar. Pandangan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dibawakan oleh Sayed Muhammad Muliady. Ecky Awal Mucharam menjadi juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Rubaie mewakili fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan yang terakhir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diwakili oleh Efyarda Asda.

Dalam pandangannya, F-PKB yakin target pertumbuhan ekonomi yang berada pada angka 6,4-6,9 persen sangat mungkin dicapai. Hal ini dengan didukung oleh tingginya laju konsumsi rumah tangga dan investasi, serta

membaiknya perekonomian global.

Sementara itu, F-PG meminta pemerintah untuk lebih realistis terkait dengan target *lifting* minyak di tahun 2014 untuk menjaga kredibilitas APBN 2014. APBN tahun depan menargetkan *lifting* minyak sebesar 900 ribu barrel per hari, tapi realitasnya hanya sampai 840 ribu barrel per hari. Melesatnya target *lifting* dan meningkatnya harga minyak dunia, sehingga memberi tekanan pada APBN 2013.

Peningkatkan belanja modal dan investasi, terutama pada sektor pertanian dan industri pengolahan nasional menjadi fokus F-PKS. Dalam paparannya, Ecky mewakili F-PKS meminta pemerintah untuk lebih serius dalam memperbaiki kinerja konsumsi pemerintah, meningkatkan daya saing dan investasi, membangun industri nasional, memperbaiki kinerja sektor *tradable*, dan memperbaiki kualitas pertumbuhan.

F-PDIP menyoroti ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, sehingga memunculkan rasa ketidakadilan. Sementara itu, F-PD berharap

mengenai kebijakan belanja pemerintah pada tahun 2014 harus mampu menstimulasi perekonomian dengan tetap mengendalikan defisit yang aman dan kesinambungan fiskal.

Sedangkan, F-Gerindra menekankan pada pemberian subsidi, baik energi maupun non energi kepada masyarakat yang merupakan tugas negara, sehingga kurang tepat jika dijadikan alat komoditas politik. F-Gerindra juga menyarankan agar pemerintah membangun infrastruktur distribusi gas karena ketersediaan gas yang cukup melimpah, sehingga bisa segera dilaksanakan konversi dari penggunaan premium ke gas.

Dalam paparannya, F-Hanura mengingatkan pemerintah agar selalu waspada terhadap tekanan yang timbul dari belanja APBN yang cukup tinggi, serta subsidi yang kurang tepat, yang dikhawatirkan berkurangnya kemampuan fiskal untuk memberikan dampak stimulus yang lebih kuat pada perekonomian nasional.

Terkait dengan ekspor bahan mentah, menjadi sorotan F-PAN. F-PAN meminta agar sebisa mungkin bahan mentah diolah dahulu di dalam negeri, termasuk pengolahan bahan tambang, dan sebesar-besarnya menggunakan sumber daya lokal.

Sebagai pemberi pandangan yang terakhir, F-PPP mengingatkan struktur anggaran yang minim akan sumber pendapatan negara, dan makin beratnya hutang, sehingga menyebabkan Indonesia terjebak semakin dalam ke anggaran defisit. F-PPP menyarankan agar pemerintah berbenah dan menyusun anggaran untuk masa mendatang.

Setelah seluruh fraksi memberi pandangan dan menyetujui untuk membahas Pokok-pokok Pembicaraan RAPBN 2014 di tingkat berikutnya, maka DPR akan mendengar tanggapan dari pemerintah pada Rapat Paripurna berikutnya. Rapat direncanakan akan berlangsung pada 28 Mei mendatang. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VIII Terima Keluhan Alih Status IAIN



Anggota Komisi VIII DPR Mahrus Munir.

Dalam RDP Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendis Kemenag dan Rektor PTAIN wilayah barat juga terungkap sejumlah permasalahan yang terjadi dan dialami oleh PTAIN. Salah satunya mengenai kesenjangan yang mereka rasakan ketika akan merubah atau mengalih statuskan IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri).

“Jika IKIP berubah menjadi UN (Universitas Negeri) itu sangat cepat, tapi kenapa kalau STAIN atau IAIN ingin berubah menjadi UIN itu malah sepertinya lebih mudah masuk surga,” ungkap Rektor IAIN Ar Raniry Darus-

salam Banda Aceh, Farid Wadji Ibrahim dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR, Rabu (22/5) di Jakarta.

Ditambahkan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang, Aflatun Muchtar, IAIN dan IKIP memiliki visi dan misi yang sama yaitu mencerdaskan anak bangsa yang memiliki akhlak mulia. Tapi kenapa sampai sekarang pemerintah pusat memberikan perbedaan perlakuan antara keduanya. Dengan kata lain Aflatun merasakan adanya diskriminasi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahrus Munir mengatakan bahwa pada dasarnya Komisi VIII mendukung pengalihstatusan, namun mungkin karena keterbatasan dana, maka proses selektifitas yang dilakukan pemerintah harus komprehensif, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

“Jika segala persyaratan yang ditentukan sudah dipenuhi maka Komisi VIII akan sangat mendukung alih status IAIN menjadi UIN. Dan saya sangat tidak ridho jika semua itu dihambat,” tegas Mahrus.

Sementara itu anggota Komisi VIII, Sumarjati Arjoso mengatakan bahwa

jangan terburu-buru mengalihstatuskan IAIN menjadi UIN, karena hal itu membutuhkan persiapan yang sangat matang. Misalnya saja ketika UIN membuka Fakultas Kedokteran, tidak hanya tenaga pengajar, melainkan juga kesiapan fasilitas, sarana dan prasarana seperti rumah sakit juga harus dipersiapkan.

Senada dengan Sumarjati, Anggota Komisi VIII dari FPG, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa ia meminta jangan sepenuhnya diarahkan untuk berubah menjadi UIN.

“Jangan selalu diarahkan untuk berubah menjadi UIN, karena seperti kekhawatiran yang pernah diungkapkan alm. Nurcholis Madjid tentang transformasi IAIN menjadi UIN, dimana saat itu Cak Nur khawatir jika IAIN berubah menjadi UIN maka mahasiswa malah banyak yang memilih fakultas umum, sementara *Tafaqquh Fiddin* (mendalami ilmu agama) menjadi sangat berkurang. Dan ini terbukti, di UIN Jakarta, Mahasiswa yang mendaftar di Fakultas Ilmu Agama jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan Fakultas Umum lainnya, seperti Fakultas Kedokteran, FISIP, dan sebagainya,” papar Ace. (Ayu) foto:ry/parle

Banggar Bahas RUU APBN-P 2013

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mulai membahas kembali RUU APBN-P2013 bersama pemerintah, Rabu (22/5). Waktu yang singkat sekitar satu bulan ini difokuskan untuk membahas materi-materi penting dalam RUU tersebut. Rapat dipimpin Ketua Banggar Ahmad Noor Supit, didampingi para wakil ketua masing-masing Djoko Udjiyanto, Olly Dondokambey, dan Tamsil Linrung.

Rapat Banggar kali ini juga terasa istimewa karena dihadiri Menteri Keuangan yang baru Chatib Basri. Ia langsung diserbu wartawan dan mendapat ucapan selamat atas pengangkatannya sebagai menteri dari para anggota Banggar. Selain Menteri Keuangan, hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan perwakilan dari Gubernur BI.

Banggar segera membentuk Panja-panja dan tim perumus atas draf RUU APBN-P2013 ini. “Pembahasan ini akan diserahkan ke komisi teknis. Untuk mendalami dan membicarakan indikator ekonomi di Komisi XI. *Lifting* minyak di Komisi VII. Setelah pembahasan di komisi-komisi, maka akan dijadwalkan raker dengan menteri untuk melakukan pendalaman. Setelah pendalaman, baru pembahasan di Panja,” urai Noor Supit.

Sementara itu Menkeu Chatib Basri, mengatakan, komunikasi dan kerja sama yang konstruktif penting dilakukan antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun RUU APBN-Pini. “Ini adalah agenda saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan RI. Saya berharap ke depan antara eksekutif dan legislatif pada prinsipnya kita adalah mitra.” katanya.



Pimpinan Banggar DPR berjabat tangan dengan Menkeu baru Chatib Basri.

Perubahan APBN, kata Menkeu, perlu dilakukan karena beberapa hal. Ia mencontohkan, sejak ditetapkannya APBN 2013, terjadi realisasi signifikan pada indikator makro

ekonomi (antara lain pertumbuhan ekonomi, ICP, *lifting* migas, dan nilai tukar) yang menjauh dari yang ditetapkan dan perlu dilakukan penyesuaian asumsi.

Perkembangan ekonomi dunia itu ternyata berjalan lebih rendah daripada yang diperkirakan. Saat ekonomi dunia melemah, akibatnya permintaan terhadap berbagai barang dalam perekonomian global juga melemah. “Kalau permintaan barang melemah, akibatnya harga-harga turun,” jelas Menkeu.

Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dan sebagai negara yang 65% eksportnya datang dari komoditas dan energi, dampaknya tertuju ke penerimaan pajak. “Itu sebabnya perubahan dasar dalam asumsi makro tersebut dan kinerja realisasi APBN-P memberikan implikasi yang signifikan pada perubahan postur. Di sisi penerimaan negara akan diperkirakan menurun,” ungkap Basri di rapat Banggar. (mh) foto:ry/parle

Panja DPR Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Dikdok

Panja DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok) pada Selasa-Kamis, 11-13 Juni 2013. Hal ini merupakan salah satu hasil kesimpulan Rapat Panja Dikdok dengan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Santoso.



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto.

“RUU Dikdok ini awalnya hanya sebagai pelaksanaan hal-hal terkait untuk mengatur pendidikan kedokteran. Ada yang berpendapat ini tidak perlu dibuat UU, namun ada juga pendapat

bahwa hal ini perlu dibuat UU. Apabila ini semua diatur di UU, tentunya juga bisa diatur masalah anggaran dan lain sebagainya. Sehingga tujuan daripada UU Dikdok ini bisa terpenuhi,” jelas Ketua Komisi X Agus Hermanto usai RDP di Gedung Nusantara I, Rabu (22/5).

Agus menambahkan mengapa pembahasan ini tetap dilanjutkan. Ada misi agar pelaksanaan pendidikan kedokteran tidak memerlukan biaya yang tinggi. Sehingga harapan kedepannya, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, bisa juga melakukan pendidikan di bidang kedokteran

“Selain itu, untuk kedepannya kita harus menyiapkan tenaga medis dan dokter, dalam hal ini yang memenuhi kualitas dan kuantitas. Hal ini juga dalam upaya persaingan global. Bisa dibayangkan jika kita tidak mempersiapkan ini, banyak dokter dari luar negeri yang praktek di Indonesia. Apalagi sekolahnya cukup mahal, orang-orang menjadi tidak minat, ini kan sama saja menghilangkan kesempatan kepada masyarakat kita untuk menjadi dokter,” jelas Agus.

Inisiatif terkait rumah sakit pendidikan kedokteran juga mengemuka

dalam pembahasan panja. Diharapkan untuk fakultas kedokteran yang sudah *seattle*, dapat mempunyai rumah sakit kedokteran. Terkait rumah sakit ini, sudah ada MoU antara Kemdikbud dan Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini, Kemenkes mempunyai kewenangan dalam menempatkan Sumber Daya Manusia seperti dokter dan ahli medis. Sedangkan terkait dengan kurikulum, ini menjadi kewenangan Kemdikbud. Diharapkan pula dengan adanya MoU dapat tercapai pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi para calon dokter.

“Terkait dengan target, kita harus selesaikan secepatnya. Namun kita tidak ingin memasang koridor-koridor target kapan selesai. Karena banyaknya substansi yang mesti kita sesuaikan, harus ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Sehingga UU ini bukan hanya selesai, tapi juga memiliki kualitas yang dapat diandalkan,” tutup Agus.

Sedangkan untuk kesimpulan berikutnya dari RDP ini adalah Panja menyepakati DIM RUU tentang Dikdok versi RDP dengan Dirjen Dikti pada 4 April lalu untuk dijadikan sebagai bahan untuk pembahasan lanjutan RUU tentang Dikdok. (sf) Foto: Odjie/Parle.

Timwas Century DPR Akan Panggil Kembali KPK Pekan Depan

Tim Pengawas Kasus Bank Century (Timwas) DPR akan memanggil kembali KPK pada Rabu (29/5) pekan depan, menyusul mangkirnya lembaga anti korupsi tersebut pada rapat Timwas Rabu (22/5). Rapat Timwas kali ini mengundang Pejabat BI, mantan direksi dan Komisaris Bank Century dan Notaris Buntario Tigris serta KPK, namun yang terakhir ini tidak hadir.



Anggota Timwas Century Fahri Hamzah.

Demikian keputusan rapat Tim Kecil Timwas Century DPR yang dipimpin Ketuanya Fahri Hamzah beberapa saat setelah penundaan rapat Timwas. Fahry mengatakan, mangkirnya KPK berkali-kali ini terutama karena ingin dikonfrontir berkaitan dengan kasus pencairan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP). "Ini merupakan upaya untuk menghindari rekonstruksi yang benar dan terbuka," ujarnya.

Lebih lanjut Fahri Hamzah mengatakan, sudah hampir dua tahun FPJP belum tersentuh. "Jadi hemat saya, karena Ketua KPK minta penundaan dengan alasan sudah masuk pokok perkara. Tapi pokok perkara kalau tidak diselesaikan jadi tanda tanya, bisa keluar dari pokok perkara," tegasnya.

Anggota Timwas dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, setelah membaca surat KPK, berarti secara psikologis tidak siap menghadapi

Timwas untuk membongkar kontruksi FPJP. "Kita sudah mengatakan terang benderang, maka saya usul Timwas yang datang ke KPK," katanya.

Sedangkan Andi Rahmat dari Fraksi PKS mengusulkan, karena KPK tidak menyentuh FPJP ia setuju Timwas DPR menggelar rapat tertutup dengan KPK. Dari pada berdebat soal alasan KPK, lebih baik Timwas yang bergerak dan berdebat lagi, kalau minta ruang tertutup atau terbuka, tidak masalah.

"Yang penting segera diselesaikan, apalagi Abraham Samad mengatakan, yang disebut tindak pidana korupsi itu proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik," ujarnya.

Bagi anggota FPG Chairuman Harahap, sejauh mana KPK untuk membuktikan kesimpulan bahwa FPJP melanggar hukum, apa langkah penyidik untuk membuktikan itu. Sehingga tidak berlarut-larut, harus dikejar lebih jauh. Sedangkan untuk pertemuan teknis, silahkan Pimpinan DPR mengatur waktu dengan Pimpinan KPK, pertemuan bagaimana bentuknya. "Kita hormati independensi KPK tetapi bukan tak berarti tak boleh diketahui oleh DPR," tukas Chairuman.



Anggota Timwas Century Gede Pasek Suardika.

Gede Pasek Suardika dari FPD mengatakan, kita pahami surat KPK,

bukannya tidak mau datang tetapi ada hal yang prinsip yang dihindari jangan sampai mengganggu profesionalisme KPK. Artinya jangan dipertemukan dengan pihak-pihak yang pernah atau sedang diperiksa dalam kasus yang sedang ditangani. Nanti bisa saja diundang bersama dengan waktu yang berbeda.

Ahmad yani dari FPP mengusulkan, Timwas bisa memanggil KPK terpisah dan ditanyakan progress report apalagi sudah menemukan peristiwa pidananya, penyalahgunaan kewenangan



Anggota Timwas Century Bambang Soesatyo.

dalam FPJP. Termasuk pemeriksaan terhadap 35 orang saksi mengapa tidak ditindaklanjuti.

Sementara anggota FPG Bambang Susatyo mengatakan, selama rezim ini masih berkuasa kasus Century tidak akan selesai. Menurutnya KPK minta waktu sendiri untuk melaporkan perkembangan penyidikan diusulkan tanggal 5 Juni. "Yang penting Timwas dapat laporan perkembangan penyidikan termasuk penyidikan Sri Mulyani di AS. Karena masyarakat masih bertanya apa sih yang didapat pemeriksaan Sri Mulyani. Rapat kali ini mestinya Timwas ingin melakukan rekonstruksi dengan sejumlah unsur meliputi notaris, Komisaris Century, pejabat BI dan KPK," jelas Bambang. (mp) foto:wahyu/parle

Kemenakertrans Diminta Pantau Surat Perintah Bayar Bagi Buruh Tangerang



Anggota Komisi IX DPR Hernani Hurustiati.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diminta Komisi IX DPR RI untuk terus memantau dan mengawal Surat Perintah Bayar sebesar Rp 2 Milyar yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang (Disnaker) untuk memenuhi hak-hak normatif buruh di CV Sinar Logam, Sepatan Timur, Tangerang.

Permintaan tersebut, disampaikan Anggota Komisi IX, Hernani Hurustiati

(F-PG) saat Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dan jajarannya yang dipimpin Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5)

Dijelaskan Hernani, bahwa dari hasil rapat dengan Bupati dan Disnaker Tangerang,

Disnaker Tangerang telah mengeluarkan surat perintah bayar kurang lebih Rp 2 Milyar kepada pemilik CV. Sinar Logam yang harus diberikan kepada 34 pekerja. Dengan perincian, upah pekerja sebesar Rp 418 juta, pesangon Rp 200 juta, dan lembur sebesar Rp 1,7 milyar

Karena ini sudah terekspose dalam rapat dengan Komisi IX, dan kemudian juga Disnaker atau Pemerintah Kabu-

paten Tangerang sudah mengekspos pula di media, yang tentunya ini menjadi perhatian masyarakat. Hernani mempertanyakan, apakah ini hanya sekedar pencitraan, apakah memang betul-betul diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu buruh-buruh.

“Oleh karena itu, kami minta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus memantau dan mengawal apa yang telah menjadi harapan para pekerja ini, bahwa mereka akan mendapatkan pesangon yang sedemikian banyak. Disamping dari Kabupaten Tangerang sendiri sudah memberikan masing-masing Rp 1 juta, tetapi itupun saya kira hanya sebagai uang untuk kembali ke daerah dan ini tidak menyelesaikan masalah dengan adanya kasus-kasus tersebut,” papar Hernani.

Hernani juga mempertanyakan, apakah Surat Perintah Bayar yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Tangerang mempunyai kekuatan hukum. Dan, apakah ini bisa dilaksanakan melihat dari kondisi dari pemilik perusahaan tersebut saat ini sudah ditahan. Hal ini penting, karena menurutnya, ini sudah menjadi harapan bagi pekerja itu sendiri. (sc)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi I Menerima Kunjungan Wakil Menlu AS

Petemuan dengan Wakil Menlu AS dimanfaatkan para anggota Komisi I untuk menanyakan soal pelanggaran udara yang dilakukan pesawat AS, yang memasuki wilayah RI di Aceh, pada Senin (20/5) kemarin.

Komisi I DPR RI yang dipimpin Hayono Isman dari FPD, menerima kunjung-

an Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan politik AS Wendy Sherman, yang didampingi Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Scot Marcel pada Selasa (21/5), di gedung DPR RI. Mendampingi Hayono, hadir juga Muhammad Najib dari F-PAN, Mu-tiah Hafidz dari FPG, dan Susaningtyas Nefo Handayani dari Fraksi Hanura.

Pertemuan Komisi I DPR RI dengan Wakil Menlu AS, dimanfaatkan para anggota Komisi I untuk menanyakan soal pelanggaran udara yang dilakukan pesawat AS, yang memasuki wilayah RI di Aceh.

“Sudah diklarifikasi oleh mereka, bahwa ada salah pengertian dari pilot



Wakil Ketua BKSAP Hayono Isman didampingi anggota Heri Akhmadi berbincang dengan Wakil Menlu AS Wendy Sherman dan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Scot Marcel.

yang berpikir sudah memiliki ijin diplomat untuk bisa isi bahan bakar di Aceh, dan ternyata belum. Sudah diurus tadi malam, sehingga sudah keluar ijinnya. Jadi, masalahnya sudah dianggap selesai,” ujar Hayono kepada Jurnal Parlemen.

Dalam pertemuan ini, kata Hayono, Komisi I juga menyinggung soal keberadaan pasukan marinir AS yang ditempatkan di Australia. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indo-

nesia Scot Marcel, jumlah pasukan AS di Australia telah berkurang menjadi 200 dari semula 600 personil.

Selain itu, membicarakan beberapa isu menarik terkait sejumlah persoalan di negara-negara tertentu yang mengemuka saat ini. Misalnya soal konflik batas wilayah dengan China, nuklir Iran, dan konflik berdarah berkepanjangan di Suriah.

“Komisi I diminta masukan terhadap berbagai isu, apakah itu isu di Asia,

terutama menyangkut isu China, konflik Suriah, menyangkut isu nuklir Iran.

Kata Hayono, kunjungan dari Wamenlu AS ini merupakan hal yang positif. “Karena kita ketahui, AS adalah kekuatan militer terbesar di kawasan Pasifik. Itu satu fakta,” tuturnya.

Karena itu, lanjut Hayono, Indonesia harus bisa memanfaatkan AS untuk mengimbangi kekuatan militer China. Sebagai negara yang ekonominya meningkat secara pesat, kata Hayono, China juga memiliki kekuatan militer yang sedemikian besar. “Ini membuat kita

merasa tidak nyaman kalau dibiarkan tidak ada penyeimbang. Nah, di sinilah kehadiran AS dibutuhkan sebagai penyeimbang,” tukasnya.

Di sisi lain, pertemuan ini juga menegaskan bahwa hubungan RI-AS adalah hubungan dua negara yang bersahabat dan seimbang. “Kita tidak ingin melihat hubungan yang lebih daripada itu, seperti hubungan AS dengan Jepang, AS dengan Israel, yang membuat aliansi,” tegasnya. (as)/foto:iwan armanias/parle.

Tembakau Sebagai *Heritage* Harus Tetap Dipertahankan

Badan Legislasi DPR RI (Baleg) meminta petani tembakau tidak perlu khawatir bagaimana *concern* Dewan terhadap perlindungan petani tembakau. RUU Pertembakauan sudah menjadi RUU Prioritas 2013, saat ini sedang dibahas di Baleg.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Baleg, Irmadi Lubis (F-PDIP) menjawab pertanyaan perwakilan petani tembakau Wonosobo saat beraudiensi dengan Baleg, bagaimana *concern* Dewan terhadap petani tembakau, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5)

“Bapak-bapak tidak perlu khawatir, kemarin RUU Pertembakauan kurang mendapat sosialisasi, saat ini Baleg kembali membahas RUU ini. Ada sebagian beranggapan bahwa RUU ini akan menghabisi petani tembakau,” terang Irmadi.



Wakil Ketua Baleg Anna Muawanah didampingi Anggota Baleg Irmadi Lubis.

Irmadi berharap, petani tembakau ikut mengawasi pembahasan RUU pertembakauan, agar nantinya UU ini tidak banyak PP yang mengaturnya. “Yang terpenting, kita punya induk bagaimana tembakau sebagai *heritage* warisan nenek moyang kita tetap harus kita pertahankan,” jelas Irmadi.

Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua Baleg Anna Muawanah, Ahmad Dimiyati Natakusuma, dan Anggota Komisi VI Dapil Jawa Timur, Abdul Kadir Karding, Irmadi menjelaskan bahwa kisruhnya pertembakauan ini dimulai dari adanya usaha untuk melenyapkan pertembakauan di Indonesia, yaitu tahun 2000, dimana ada *Framework Convention Of Tobacco Control* (FCTC) di Singapore.

Dimana waktu itu, pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Gus Dur dan Megawati menyatakan tidak mau meratifikasi FCTC tersebut. Indonesia memang terikat pergaulan dengan negara-negara internasional dan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kita tidak

harus menjadi budak negara-negara tersebut. Oleh karenanya Indonesia membentuk *roadmap* Industri Hasil Tembakau (IHT).

“Intervensi asing untuk tembakau ini memang sangat sangat kuat, oleh sebab itu kita harus bersatu padu kita memang salah satu anggota negara-negara dalam pergaulan internasional, namun kita bukan budak mereka,” tegas Irmadi.

Dalam *roadmap* tahun 2000, urutannya adalah penerimaan negara, tenaga kerja, dan kesehatan. Karena pada waktu kita sedang dalam kesulitan. *Roadmap* tahun 2004, urutannya tenaga kerja, penerimaan negara, dan kesehatan masih di belakang. Tahun 2009, Tenaga Kerja, Kesehatan dan Penerimaan Negara.

Dari periode-periode tersebut, kita harus tahu, bahwa cukai itu bukan pendapatan negara melainkan penerimaan negara. Jika penerimaan negara berarti bukan sepenuhnya un-

tuk negara tetapi harus dikembalikan kepada sumber-sumber penghasilnya atau sumber-sumber untuk mengatasi dampak negatif daripada penghasil tersebut.

“Oleh karena itu kami tahu persis, waktu itu perjuangan kita bagaimana kemudian pemerintah dengan naskah akademik yang disusun IMF waktu kita kembalikan, karena waktu itu jelas-jelas tidak menasbikan *roadmap* kita,” jelas Irmadi.

“Tapi ternyata negara baik pemerintah dan DPR ini tidak memenuhi apa sebetulnya yang harus dilakukan didalam *roadmap* tersebut,” tambahnya.

Penerimaan cukai itu didalam *roadmap* tersebut, menurut Irmadi, mestinya untuk membina petaninya, dan kalau memang mau dialihkan kemana biayanya. “Itulah semua dari cukai tapi itu tidak dilakukan. Karena itu kita menganggap *roadmap* itu tidak ada, tidak pernah dilakukan,” paparnya. (sc)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi V DPR Dukung Pembangunan Infrastruktur Sulawesi



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said

Komisi V DPR mendukung penuh rencana pembangunan infrastruktur di Pulau Sulawesi. “Untuk membangun Indonesia tidak bisa tidak, harus membangun konektivitas di Pulau Sulawesi,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said saat menerima Gubernur se-Sulawesi yang tergabung

dalam Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS), di Gedung Nusantara, Selasa, (21/5).

Menurut Muhidin, Komisi V DPR mengharapkan rencana pembangunan jalur kereta api di Pulau Sulawesi dapat segera terwujud. “Memang ada masukan rencana bantuan Cina namun karena anggaran APBN kita cukup maka bisa dimasukkan anggarannya dan kita sepakat dana Bina Marga cukup besar untuk pembangunan di Sulawesi,” paparnya.

Muhidin mengatakan, kendala utama dari pembangunan infrastruktur yaitu persoalan pembebasan lahan. artinya jika tidak tuntas soal lahan tentu dapat menghambat pencairan anggarannya.

Sementara Gandung Pardiman (F-PG) mengatakan, Sulawesi merupakan salah satu koridor MP3EI keempat, di bidang pertanian, perikanan, pertambangan karena itu kita harapkan

seluruh pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dapat terealisasi.



Anggota Komisi V DPR Michael Wattimena.

“Ini kita harapkan dapat menjadi percontohan untuk Pulau lainnya, misalnya saja di Pulau Kalimantan kita temui kerap para pemangku kebijakan sering berebut lahan, dan kepentingan



di wilayahnya, jadi nanti kita harapkan dapat diundang dan duduk bersama di Komisi V DPR,” ujarnya.

Michael Wattimena (Fraksi Partai Demokrat) menyatakan, dirinya mendukung penuh rencana program di Daerah Sulawesi. “Karena melalui

pembangunan di Sulawesi dapat menunjang ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Yang menjadi perhatian serius yaitu soal pembangunan waduk,” ujarnya.

Menurutnya, Sulawesi merupakan pulau masa depan dan memiliki potensi

alam atau energi yang belum digarap dengan serius. “Pembangunan jembatan harus menjadi prioritas dalam pembahasan kita, serta Pengadaan rel kereta api di daerah Sulawesi, jika kondisi geografis Sulawesi memungkinkan dibangun,” paparnya. (si)/foto:odjie/parle/iw.

Meriahnya Satu Nusa Satu Suara



Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Taufik Kurniawan dan Sohibul Iman saat diwawancarai presenter Metro TV Rory Asyari.

Oh jiwa muda

Jangan sampai mudah menyerah

Semua demi cinta

Hai jiwa muda pertahankan cinta

Itulah salah satu penggalan lirik lagu *Indahnya Cinta* yang dibawakan oleh Nidji ketika membuka acara Satu Nusa Satu Suara di Tangga Halaman Depan Gedung Nusantara, DPR. Acara hasil kerjasama antara DPR dengan Metro TV ini disiarkan live pada pukul 19.05 WIB, Senin (20/5), semalam. Pengisi acara diantaranya band Nidji, Denny Darko, Mo Siddiq, dan Queen Percusion.

Seperti diberitakan sebelumnya, acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari Kebangkitan

Nasional, dan dihadiri oleh pimpinan DPR. Pimpinan DPR yang hadir diantaranya Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Taufik Kurniawan, dan Wakil Ketua Sohibul Iman. Wakil Ketua Pramono Anung tidak dapat menghadiri acara dikarenakan ada tugas lain.

Setelah Nidji membawakan lagu pertama, host Aviana Malik dan Rory Asyari membuka acara berkonten 15 tahun reformasi yang ada di gedung DPR. Acara dilanjutkan dengan pemutaran video yang berisi tentang rekam jejak peran pemuda Indonesia sejak jaman penjajahan hingga saat ini.

Dalam acara ini juga disediakan spot kepada publik untuk menuliskan aspirasi, kritik, saran maupun harapan kepada presiden yang akan datang. Namun juga diperbolehkan menulis

terkait dengan hari Kebangkitan Nasional.

Dalam spot itu, Marzuki menuliskan: Negara membutuhkan pemuda-pemudi yang mampu, mau dan siap menjaga martabat dan kejayaan bangsa. Wahai pemuda-pemudi Indonesia, bangun dan bangkitlah. Anda mampu untuk melakukannya sekarang, saat ini juga.

“Dalam pandangan saya, ada 2 kriteria pemuda. Yang pertama adalah pemuda yang terus melakukan kegiatan positif, sesuai dengan kapasitas dan umur mereka. Melakukan kegiatan positif terus menerus. Tapi di sisi lain, ada juga pemuda yang berpikiran pragmatis atau instan. Ingin mendapatkan dengan cara yang cepat, dan ini yang sangat memprihatinkan kita. Kita mendorong pemuda yang bisa menginspirasi pemuda lainnya, untuk bangun dan bangkit,” tegas Marzuki ketika diwawancara Rory.

Ketika disinggung mengenai presiden yang ideal untuk masa depan, Marzuki menegaskan kriteria presiden yang akan datang adalah orang yang betul-betul mempunyai komitmen untuk rakyat. Komitmen sebagaimana apa yang telah dikatakannya kepada rakyat.

Acara berlangsung dengan cukup meriah. Ada juga segmen dimana perwakilan partai politik dapat menyampaikan pesan partai mereka dalam sebuah benda dan aspirasi dari mahasiswa Sekolah Tinggi Komunikasi Pembangunan, Medan yang menegaskan pemuda-pemudi jangan golput dalam pemilu. Acara ditutup dengan penampilan Nidji membawakan lagu *Biarlah*. (sf)/foto:wahyu/parle.

Komisi VI DPR Siap Bahas RUU Perindustrian



Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno

Komisi VI DPR RI siap membahas RUU Perindustrian usulan pemerintah. Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat, semua fraksi, kecuali FPKS yang tidak hadir, menyatakan kesiapannya melanjutkan pembahasan RUU Perindustrian dalam Panja bentukan Komisi VI.

Rapat dipimpin Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto (F-PG), didampingi dua wakil ketuanya Benny K Harman (F-PD) dan Erik Satrya Wardhana (F-Hanura), Selasa (21/5). RUU Perindustrian sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk menggantikan UU Perindustrian yang lama. Di tengah industri nasional yang masih memprihatinkan, kehadiran RUU ini nantinya bisa menggairahkan sektor industri dan mensejahterakan masyarakat.

F-PDI Perjuangan lewat juru bicaranya Hendrawan Supratikno, mengatakan, ada tiga spirit dalam RUU Perindustrian ini, yaitu spirit agregasi, spirit sinergi, dan spirit integrasi dan konsistensi. "Tidak ada alasan untuk tidak membahas RUU Perindustrian ini," tandas Hendrawan. Dan F-PDI Per-

juangan siap memberikan nama-nama terbaik untuk menjadi anggota Panja.

Hendrawan juga menegaskan, pada momen Kebangkitan Nasional seperti sekarang, jangan sampai menjadi hari kebangkrutan nasional karena lemahnya sektor industri kita. Negara kaya dan maju, lanjut Hendrawan, selalu merupakan negara industri. Sektor industri harus dijadikan titik tolak kemajuan bangsa.

Sektor industri harus menjadi isu parsial bukan sektoral belaka. RUU Perindustrian ini selanjutnya mulai dibahas 3 minggu ke depan bersama Menteri Perindustrian. Dan diharapkan rampung dalam sisa masa sidang DPR. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Optimis, RUU Keperawatan Selesai 2013



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf menerima Perwakilan PPNi.

RUU Keperawatan berusaha diselesaikan tahun 2013 ini. Di tahun politik, memang, banyak pembahasan RUU yang tersendat. Tapi, khusus RUU

Keperawatan ini akan mendapat prioritas dari DPR RI. Dan hasil keputusan rapat Badan Musyawarah (BAMUS) DPR, pembahasan RUU ini diserahkan

sepenuhnya kepada Komisi IX.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat menerima delegasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di ruang rapat pimpinan, Selasa (21/5). "Hari ini surat akan kami kirim ke Komisi IX," tandas Pramono kepada para delegasi PPNI. Surat tersebut nantinya mengamanatkan agar segera memulai pembahasannya di Komisi IX.

Bahkan, Pramono mengingatkan, bila ada anggota fraksi di Komisi IX yang menghalang-halangi pembahasan, agar tidak dipilih lagi pada Pemilu 2014. Pernyataan Pramono ini disambut baik PPNI. Nova Riyanti Wakil Ketua Komisi IX ikut hadir mendampingi Pramono Anung. Menurutnya, Komisi IX memang menunggu surat dari pimpinan. Bila sudah turun surat itu, Komisi IX segera tancap gas membahas RUU tersebut.

Seperti diketahui, DPR tinggal

memiliki masa sidang 2 kali lagi sebelum menuju Pemilu. Dan pimpinan, kata Pramono, akan memantau RUU Keperawatan ini di sisa masa sidang. Ditambahkan pula oleh Nova, idealnya RUU Keperawatan dibahas di Komisi IX, karena para anggota sudah memahami betul substansinya. Apalagi, Komisi IX pula yang mengawal RUU ini dari awal.

Sementara itu, delegasi perawat

yang dipimpin Sekjen PPNI Harif Fadilah, menyatakan, pemerintah tidak serius bahas RUU Keperawatan. Di dunia hanya Indonesia dan Laos yang belum punya UU Keperawatan. Para dokter begitu mudah mendapat perlindungan hukum lewat UU. Tapi perawat masih sulit. Kementerian Kesehatan juga, kata Harif, sering mengeluarkan statement yang menyakiti hati para perawat. Kesejahteraan perawat juga masih di bawah standar.

Melihat realitas ini, para perawat di Indonesia sepakat akan mogok kerja bila RUU Keperawatan dan kesejahteraan perawat tidak diperhatikan. Para perawat sempat mengancam mogok pada tahun-tahun sebelumnya, tapi karena masih memiliki rasa kemanusiaan, aksi mogok masal itu urung dilakukan. Mereka masih punya hati nurani, karena harus melayani kesehatan masyarakat. (mh) foto:ry/parle

Ketersediaan dan Distribusi BBM Tidak Tepat Sasaran

Komisi VII DPR menilai ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi kerap tidak tepat sasaran. Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan Raker dengan Menteri ESDM Jero Wacik, Dirut Pertamina, BPH Migas, di Gedung Nusantara I, Selasa, (21/5).

“Yang jadi problem dilapangan yaitu distribusi karena banyak terjadi penyelundupan dimana-mana. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat

dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah jangan sampai ada penyelundupan,” tegas anggota DPR Ali Kastella dari Fraksi Partai Hanura.

Dia menambahkan, bahkan Pemda berinisiatif membangun SPBU, namun sampai saat ini tidak direspons oleh Pertamina “Pemda Biak Numvor sudah membangun SPBU dan meminta kuota BBM Bersubsidi namun tidak diberikan sampai sekarang,” ujarnya.

Dia mengatakan, BBM Bersubsidi di Papua bahkan mencapai 15-20 ribu perliter. Sementara di pedalaman bisa mencapai 30 Ribu perliter. “Kita hanya meminta keadilan saja agar pasokan tersedia,” terangnya.

Sementara anggota DPR Asfihani (F-PD) mengatakan, kebijakan pemerintah dalam BBM subsidi sudah tepat, namun pelaksanaannya tidak tepat sasaran.

“Bahkan di sebuah desa Kalsel, harga BBM mencapai Rp. 8000-12 ribu perli-



Anggota Komisi VII DPR Asfihani.

ter dan mereka tidak mempersalahkan harganya, jadi ketika melihat orang Jakarta harga BBM subsidi murah dan mengancam akan demo atau unjuk rasa mereka malah heran dan tertawa,” katanya.

Dia menambahkan, masyarakat hanya ingin ketersediaan BBM jadi berapapun harganya akan dibeli oleh masyarakat. (si) /foto:iwan armanias/parle.



Anggota Komisi VII DPR Ali Kastella.

DPR Sambut Baik Respon Presiden Terhadap RUU ASN

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengatakan bahwa Komisi II DPR bersyukur ketika ada respon yang menyatakan bahwa Presiden SBY menempatkan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

ini sangat penting dan berkehendak untuk menuntaskan RUU ini ditingkat rapat kabinet.

“Kami sangat apresiasi atas respon

dari Presiden ini, untuk itu mohon bisa menjadi catatan dan bisa disampaikan didalam rapat kabinet, dalam mindset kami Komisi II DPR, kami tidak akan menghantarkan Indonesia yang



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar saat RDP dengan Wamen PAN Eko Prasodjo, dan Sesmen PAN Tasdik.

demokratis dan sejahtera lewat pemilu 2014 nanti, apabila tidak menuntaskan 2 RUU yaitu RUU ASN dan RUU Pertanahan,” kata Agun saat RDP Panja RUU ASN dengan Wamen PAN Eko Prasodjo, Sesmen PAN Tasdik di DPR, Jakarta, Senin (20/5)

“Kalau 2 RUU ini selesai, ini merupakan karya besar bagi Komisi II DPR, jadi tolong Pak Wamen PAN dalam rapat kabinet yang akan datang, pernyataan Komisi II DPR ini tolong dihantarkan kepada Presiden tentang bagaimana posisi ASN dalam konteks membangun Indonesia sejahtera,” tegas Politisi dari Partai Golkar ini.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wamen PAN Eko Prasodjo menyambut baik atas beberapa hal yang sudah disampaikan terutama telah menempatkan RUU ASN dan RUU Pertanahan sebagai 2 RUU penting sebagai pondasi untuk Indonesia sejahtera dan demokratis dan pesan Komisi II DPR akan di sampaikan kepada menteri,

wakil presiden dan presiden dalam sidang-sidang yang akan terjadi pada persidangan selanjutnya.

“Dikeseempatan ini kami juga menyampaikan, bahwa pemerintah juga telah menyiapkan 2 RUU lain yang kami pikir juga menjadi pondasi pemerintahan yang baik yaitu RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah,” ujar Eko.

RUU Administrasi Pemerintahan, kata Eko, sedang dalam proses akhir pembahasan disidang kabinet, dan ada beberapa hal yang diminta Presiden untuk disempurnakan, sedangkan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah diperlukan guna memperkuat Inspektorat Jenderal dalam pengawasan preventif maupun refresif.

“Nantinya 2 RUU ini akan kami siapkan dan tampilkan didalam rapat Komisi II DPR dan Panja, serta akan kami persandingkan draft DPR dan Pe-

merintah, serta landasan yuridis yang akan kami perhatikan dan diharmonisasikan dalam proses pembahasannya,” jelasnya.

Dikeseempatan yang sama, Eko juga menjelaskan, mengenai revisi UU No.32 Tahun 2004, posisi pemerintah sementara ini, BAB III mengenai kepegawaian daerah akan kami pindahkan ke RUU ASN, dan hanya beberapa pasal penghubung antara RUU ASN dan UU No. 32 Tahun 2004.

“Kami juga sudah bertemu dengan Tim Reformasi Birokrasi, sehingga menurut saya kita perlu membahas secara bersama-sama antara revisi UU No.32 Tahun 2004 yang sedang berlangsung dengan RUU ASN,”harap Eko.

Selanjutnya, dalam draft RUU ASN, secara khusus dewan tidak mengatur mengenai pengembangan kompetensi, oleh karena itu, pemerintah memasukan hal tersebut, bahwa setiap Aparatur Sipil Negara wajib memperoleh hak untuk mengembangkan kompetensi, dan setiap instansi wajib merencanakan dan menganggarkan pengembangan kompetensi ASN.

“Kemudian, ada hal-hal baru mengenai penegasan PNS yang diberhentikan karena menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan, tidak dapat kembali diangkat menjadi ASN,” terangnya.

Demikian juga, kata Eko, pemerintah juga akan memperkuat perlindungan hukum, keselamatan kerja dan kesehatan dari pegawai ASN, serta sejumlah program percepatan reformasi birokrasi dalam rangka mendukung dan memberikan dasar bagi implementasi RUU ASN. (nt) foto:wahyu/parle.

Generasi Muda Harus Jadi Pejuang Tangguh Bagi Kejayaan Bangsa

Dalam momentum hari kebangkitan nasional saat ini, generasi muda harus mampu melecut kembali nilai kebersamaan sebagai bangsa dan dalam

menghadapi globalisasi dengan menggelorakan rasa bangga dan cinta tanah air.

“Generasi muda harus menjadi pejuang dan petarung yang tangguh bagi kejayaan bangsa karena sesungguhnya kita semua telah mewarisi

darah dan jantung para pejuang yang gagah berani mengusir penjajah. Tidak ada bangsa yang berhasil tanpa perjuangan keras dan tidak akan ada bangsa yang maju tanpa pengorbanan serta Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kecuali mereka yang berusaha mengubah bangsa mereka masing-masing,” kata Sekjen DPR Winantuningtyastiti sebagai Inspektur upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional di halaman Gedung DPR Senin (20/5).

Dalam upacara yang diikuti para pegawai di lingkungan Setjen DPR, MPR dan DPD, Sekjen DPR mengatakan, banyak pejuang pada saat ini yang tetap setia berkarya membangun negeri ini. Seperti halnya anggota TNI dan POLRI yang menjalankan tugas di daerah perbatasan untuk menegakkan kedaulatan wilayah Indonesia.

Selain itu lanjutnya, para guru, bidan

maupun dokter yang mengabdikan sampai kedaerah-daerah terpencil serta



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti.

para PNS yang bekerja di semua jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan para pekerja swasta, para relawan yang berjuang dengan tulus dan ikhlas membangun bangsa ini dalam kebersamaan dan kesatuan.

“Kita semua berharap agar setiap elemen meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun pribadi agar kebahagiaan dan kesejahteraan bersama dapat kita raih,” tandas Win, panggilan akrab Sekjen DPR.

Ditambahkan, dengan memperingati hari Kebangkitan Nasional ini diharapkan kita mampu rakit perahu menjadi perahu kokoh untuk mendekatkan bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan modern dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (wy) foto:wahyu/parle

Korupsi Semakin Masif Cederai Keadilan Masyarakat



Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik 7 Anggota PAW.

Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, reformasi yang telah berjalan selama 15 tahun belum sepenuhnya berhasil menuntaskan beberapa agenda pokok.

Permasalahan penegakan hukum, tindakan korupsi yang semakin masif telah mencederai keadilan masyarakat.

Demikian ditegaskan Ketua DPR Marzuki Alie ketika menyampaikan pidato sambutan pada pelantikan anggota pengganti antar waktu (PAW) di Ruang Pustaka Loka Gedung DPR, Senin (20/5).

Sebanyak tujuh anggota dilantik terdiri atas 3 anggota fraksi PKS dan 4 anggota Fraksi Demokrat. Ketiga anggota Fraksi PKS adalah Budiyanto menggantikan Luthfi Hasan Ishaq, Wirianingsih menggantikan Achmad Riyadi dan Asman Amin menggantikan Muhammad Anis Matta.

Sedangkan empat anggota FPD adalah Surya Kusumanegara menggantikan Angelina Sondakh, Natasya Tara menggantikan Subagyo Partodihardjo, Anwar Yunus menggantikan Edhie Baskoro Yudhoyono dan R.A Ida Riyanti menggantikan Sudewa.

Lebih lanjut Ketua DPR mengatakan, proses demokratisasi di Indonesia telah berjalan cukup membanggakan, dengan berlangsungnya pemilu secara langsung baik dalam pemilu Presiden maupun pemilu legislatif. Namun harus diakui bahwa pelaksanaan demokrasi khususnya keberlangsungan Pemilu-kada, masih ditemui beberapa kasus dan pelanggaran yang berdampak pada konflik horizontal.

“Menghadapi pemilu 2014, kita mengharapkan kondisi politik akan tetap terjaga dan pemilu akan berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” tegasnya.

Kepada anggota yang mencalonkan kembali, Ketua DPR berharap proses pencalonannya tidak akan mengganggu tugas pokok sebagai anggota Dewan. “Keberadaan para anggota DPR dalam melaksanakan tiga fungsi utama Dewan merupakan wujud dari representasi rakyat,” ungkap Marzuki menambahkan. (mp) foto:ry/parle.

Komisi VIII Yakin RUU JPH Segera Selesai



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Jaminan Produk Halal (JPH) ketika ditemui usai Rapat Paripurna Senin (20/5) mengatakan, meski diskusi tentang RUU ini masih alot, namun ia yakin bahwa RUU JPH akan segera disahkan pada masa sidang ini.

“Karena itu, saya sebagai Pimpinan Komisi VIII dan juga Pimpinan Panja RUU JPH berharap kepada seluruh fraksi harus konsisten terhadap konten dan substansinya. Meskipun dibuka ruang perubahan, tetapi perubahan itu yang ada bingkai dan logikanya,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini.

Menurut Jazuli, kealotan dalam diskusi itu menyangkut beberapa hal. *Pertama* tentang status lembaga Penjamin Produk Halal, apakah di bawah Presiden seperti diusulkan DPR atau di bawah Menteri Agama seperti yang diinginkan pemerintah. *Kedua*, tentang peran Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketiga, tentang sifat, apakah *mandatory* (wajib) atau *voluntary* (sukarela).

“Untuk poin pertama dan ketiga sepertinya sudah ada titik terangnya. Sementara untuk peran MUI memang masih banyak hal-hal yang perlu kita dalam,” katanya.

Ditambahkannya, DPR memiliki hak untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan pemerintah tentu harus membuka ruang kepada semua pihak untuk memberi masukan.

“Kita cari yang terbaik. Selalu saja dalam setiap persoalan, orang pandangnya berbeda-beda. Nah, dengan pandangan yang berbeda-beda itu, kita cari titiknya, yaitu maslahat. Mana yang lebih maslahat buat orang banyak, buat rakyat, buat bangsa. Itu yang harus kita lakukan. Insya Allah dalam minggu-minggu ini juga kami akan rapat melanjutkan RUU ini,” pungkasnya. (Ayu)/foto:odjie/parle.

Badan Kehormatan Tuntaskan Rekap Absen Anggota

Badan Kehormatan - BK DPR RI saat ini sedang menyelesaikan rekapitulasi absensi untuk mengurai masalah ketidakcocokan data yang dikeluhkan sejumlah anggota DPR. Hasil akhir yang merupakan resume kehadiran anggota akan disampaikan kepada seluruh Pimpinan Fraksi.

“Kita ini sedang menuntaskan rekap absensi karena kemarin kita menerima keberatan dari sejumlah anggota DPR yang mempertanyakan akurasi data yang muncul di media. Dari resume itu akan jelas nanti berapa kali hadir, alfa, lalu izinnya berapa,” kata Ketua BK Trimedya Panjaitan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (20/5/13).

Ia menambahkan BK juga akan melakukan pemeriksaan silang antara



Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan.

absensi manual dengan absen sidik jari yang baru saja diterapkan. Hasil pantauan sementara menurut Politisi Fraksi PDIP ini tidak ada perbedaan dari kedua data ini.

“Hasil akhir dari proses rekap ini

akan kita sampaikan kepada Pimpinan Fraksi lewat surat untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Pada bagian lain Trimed menjelaskan BK akan segera menuntaskan 2 kasus yang sudah melewati proses pemeriksaan. *Pertama*, kasus ketidakhadiran anggota FPDIP Sukur Nababan dalam rapat paripurna lebih dari 6 kali dan *kedua*, laporan masyarakat terhadap anggota Fraksi Partai Demokrat Supomo yang diduga terlibat makelar anggran.

“Pemeriksaan termasuk meminta keterangan sejumlah pihak sudah selesai selanjutnya BK segera putus dalam rapat pleno dalam waktu dekat,” pungkasa dia. (iky) Foto: Iwan Armanias/Parle.

RUU ASN Dorong Efisiensi Birokrasi



Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa didampingi Andrinof Chaniago dan Sesmen KemenPAN Tasdik Kinanto.

Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa optimistis bahwa Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) akan menjadi landasan hukum yang mendorong birokrasi pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

“RUU ASN yang saat ini sedang dibahas di DPR secara filosofis dan sosiologis diusulkan karena birokrasi yang rumit dan terkooptasi oleh kekuasaan politik cenderung tertutup, lamban, serta sarat praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” kata Agun dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “RUU ASN” di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut Agun, birokrasi di pemerintahan saat ini yang rumit, tertutup, lamban, serta sarat praktik KKN sulit menghasilkan pemerintahan yang baik, efisien, dan transparan.

Karena itu, kata dia, RUU ASN yang nantinya diundangkan diharapkan dapat mendorong pemerintahan yang baik, efisien, dan transparan.

“Saya optimistis pemerintahan ke depan akan lebih baik serta birokrasinya lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Para pegawainya tetap independen,

tidak terkooptasi oleh kekuatan politik,” katanya.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan jika politik anggaran pemerintah tetap seperti saat ini, maka ke depan tidak akan berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat.

Para pemimpin dari tingkat pusat hingga daerah, menurut dia, juga harus memahami tata kelola negara yang baik, bersih, dan transparan.

“Jika mencermati para menteri kabinet saat ini, hanya sekitar 10 persen yang memahami tata kelola negara,” katanya.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tasdik Kinanto juga optimistis RUU ASN akan membawa perubahan besar dalam birokrasi pemerintahan, terutama pada perbaikan budaya kerja dan perbaikan sistem.

Menurut dia, sasaran utama dari RUU ASN adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, berintegritas, memberikan pelayanan terbaik pada rakyat, dan bagaimana sistem ini mendudukkan orang secara objektif sesuai kompetensinya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Andrinof Chaniago mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah lima tahun “nginap” di DPR baru sebatas mencoba mengatur orang-orang yang saat ini ada di jajaran birokrat.

Padahal masalah aparatur sipil negara ini menurut Andrinof, bermula di hulu yakni pada tataran rekrutmen dan sistem yang selama ini dipakai dalam menjangkau birokrat.

“RUU ASN ini baru sebatas mengatur pegawai negeri sipil. Padahal masalahnya bermula di hulu, yakni saat rekrutmen dan sistem yang dipakai,” kata Andrinof Chaniago.

Demikian juga halnya dengan cara-cara yang dipakai oleh DPR untuk mendorong kinerja instansi yang memberlakukan renumerasi bagi instansi yang dinilai membaik kinerjanya. Menurut Andrinof, renumerasi terbukti tidak cukup efektif jadi stimulus bagi instansi lainnya sebab dari keseluruhan birokrat sangat sedikit yang berkinerja memuaskan.

“Ini kata Menpan, hanya sekitar 5 persen dari keseluruhan jabatan yang ada di pemerintahan diisi oleh orang-orang yang punya kompetensi pada jabatannya,” kata Andrinof, mengutip Menpan dan Reformasi Birokrasi. Kalau saya menghitung 60 persen yang kompeten, imbuhnya.

Pertanyaan mendasar untuk rekrutmen ini lanjutnya, apakah akan tetap dilaksanakan oleh instansi bersangkutan atau diserahkan ke Perguruan Tinggi atau lembaga-lembaga khusus rekrutmen.

Siapa atau lembaga mana yang merekrut menurut Andrinof, akan menentukan hasil dari seleksi yang dilakukannya. “Kalau cara rekrutmen benar dan terukur pasti dapat bibit yang bagus dan bisa bekerja,” ujar dia. (as) foto:wahyu/parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik tujuh Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) terdiri dari tiga Anggota PKS dan empat Anggota F-PD. Senin (20/5) Foto: Ry/Parle.



Wakil Ketua BKSAP Hayono Isman menerima Wakil Menlu AS Wendy Sherman dilanjutkan dengan foto bersama sejumlah Anggota BKSAP. Senin (20/5) Foto: Iwan Armanias/Parle.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti memimpin Upacara Bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2013. Senin (20/5) Foto: Wahyu, Odjie/Parle.